

**PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA BANJAR BARA KECAMATAN DAHA SELATAN
KAB HULU SUNGAI SELATAN**

**Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin**

Abstrak: Besarnya jumlah dana desa yang diperoleh pihak pemerintah desa, maka diperlukannya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pihak-pihak pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa tersebut selama tahun berjalan. Adapun tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dan juga menganalisa pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Bara Kecamatan Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisa data kuantitatif, Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat eksplanasi ilmu dapat digolongkan pada jenis penelitian kausalitas yaitu penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab akibat (*cause- effect*) antar beberapa konsep atau beberapa variable atau beberapa strategi yang dikembangkan dalam manajemen dan diarahkan untuk menggambarkan adanya sebab akibat antara beberapa situasi yang digambarkan dalam variable, dan atas dasar itu ditariklah sebuah kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Artinya semakin baik Kompetensi Perangkat Desa yang diberikan maka semakin tinggi pula Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Peningkatan terhadap variabel Kompetensi Perangkat Desa 0,584 adalah positif, yang berarti bahwa adanya hubungan searah antara variabel bebas dan variabel terikat, semakin meningkat nilai pada variabel Kompetensi Perangkat Desa, maka hubungan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pegawai juga akan meningkat sebesar 58,4%. Kemudian Nilai R dengan nilai sebesar 0,889 atau 88,9% adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat. Perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik, maka pengetahuan, kemampuan, dan sikap dalam penyusunan laporan keuangan juga akan berkualitas

Kata Kunci: Kompetensi Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Abstract: The large amount of village funds obtained by the village government requires accountability or accountability from the village government parties for the management of these village funds during the current year. The purpose of this study is to determine and also analyze the effect of Village Apparatus Competence on Village Fund Management Accountability in Banjar Bara Village, Daha Selatan District, Hulu Sungai Selatan Regency. This research uses quantitative data analysis methods. This type of research is included in the type of research that is explanatory in nature. It can be classified in the type of causality research, namely research that wants to find an explanation in the form of a cause-effect relationship between several concepts or several variables or several strategies. developed in management and directed to describe the cause and effect between several situations described in the variable, and on the basis of which a conclusion is drawn. The results showed that the Competence of Village Apparatus had a significant effect on the dependent variable of Village Fund Management Accountability. This means that the better the Competence of the Village Apparatus given, the higher the Accountability of Village Fund Management. The increase in the Village Apparatus Competency variable 0.584 is positive, which means that there is a unidirectional relationship between the independent variable and the dependent variable, the higher the value of the Village Apparatus Competence variable, the relationship between the Village Fund Management Accountability of employees will also increase by 58.4%. Then the R value with a value of 0.889 or 88.9% is the correlation coefficient which indicates the level of the relationship is very strong. Village officials who have good competence, then the knowledge, abilities, and attitudes in preparing financial reports will also be of high quality

Keywords: Village Apparatus Competence, Village Fund Management Accountability

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yuridiksi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekarang ini, perhatian pemerintah terhadap desa mengalami peningkatan karena adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap desa memiliki hak dan kesempatan untuk mengatur dan mengelola keuangan desa secara mandiri, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pengelolaan keuangan desa secara mandiri dan pengembangan potensi desa dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari kata akuntabilitas. Menurut Mustofa (2012) dalam Wardana (2016), akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting karena merupakan media pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Kebijakan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran sangatlah tepat. Daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, harus menjadi titik perhatian utama pemerintah. Tidak hanya membangun jalan, pemerintah harus mendirikan puskesmas, sekolah, pasar, pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan mendapat jaminan mata pencarian, akses kesehatan,

akses pendidikan, dan akses penerangan listrik. Wajah perbatasan Indonesia, harus lebih baik dari negara tetangga. Dalam masa lima tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo akan memberikan perhatian khusus untuk membangun daerah-daerah pinggiran yang selama ini tertinggal. Tekad Jokowi tersebut, sejalan dengan butir ketiga Nawa Cita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Setkab.go.id (2019)

Besarnya jumlah dana desa yang diperoleh pihak pemerintah desa, maka diperlukannya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pihak-pihak pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa tersebut selama tahun berjalan. Selain itu, dengan besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, memungkinkan terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perangkat desa.

Banyaknya kasus ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan yang dilakukan mengenai pertanggungjawaban dana desa. Pemanfaatan dan pengelolaan dana desa di Kalimantan Selatan rawan penyimpangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, telah membuat 79 laporan hasil audit atas kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara Rp98,38 miliar. "Area penyimpangan yang ditemukan dominan Dana Desa, menempati urutan teratas," ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel. Medcom.id (2022)

Salah satu kasus dalam penyelewengan dana desa dari tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar, akhirnya menetapkan mantan Kepala Desa Makmur, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2014-2019, Muhammad Abdusisahid sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana desa. Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (2020).

Kemudian kasus berikutnya kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel), meringkus perempuan berinisial WL, tersangka kasus korupsi Dana Desa. Sebelumnya WL, yang merupakan Sekretaris Desa Batu Ampar, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Tanah Laut, menghilang dan kemudian diburu pihak kejar setempat. Detik.news (2021).

Beberapa kasus yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terjadi tersebut disebabkan oleh kurangnya tanggungjawab dan kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat dan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Beberapa masalah tersebut menyebabkan tanggungjawab dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan menjadi rendah, dan menyebabkan kecurigaan dari masyarakat, yang berakibat pada kurangnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah kompetensi perangkat desa. Kompetensi perangkat desa merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam melakukan suatu tugas. Menurut Budiana, Said, & Nursini (2019), Sugiarti & Yudianto (2017), dan Umar, Usman, & Purba (2018) dapat diketahui bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama & Novita (2017) dan Perdana (2014) tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana diketahui bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Banjar Bara Kecamatan Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan pada penelitian ini adalah : Apakah Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Bara Kecamatan Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan ?

Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu menyimpang dan terfokus kepada masalah-masalah pokok, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut: Kompetensi Perangkat Desa dan juga Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Bara Kecamatan Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dan juga menganalisa pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Bara Kecamatan Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan alat analisis statistik berupa *software* SPSS Versi 21. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi linear berganda yang akan digunakan dianggap layak atau bebas dari pelanggaran asumsi klasik agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Jawaban Responden

a. Hasil Jawaban Responden Variabel X

Tabel 4.2
Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi Perangkat Desa (X)

Item Pertanyaan	Skor										Mean
	STS		TS		N		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Perangkat desa mengetahui peraturan tentang pengelolaan dana desa	0	0	7	7.0	55	55.0	27	27.0	11	11.0	3.4200
Pengetahuan akan teknologi dan informasi menunjang kemampuan perangkat desa dalam bekerja	0	0	7	7.0	46	46.0	47	47.0	0	0	3.4000
Perangkat desa mampu mengelola dana desa dengan baik	0	0	9	9.0	53	53.0	28	28.0	10	10.0	3.3900
Perangkat desa mampu mengalokasikan dana desa sesuai dengan kebutuhan	0	0	14	14.0	51	51.0	21	21.0	14	14.0	3.3500
Perangkat desa bertanggungjawab	0	0	2	2.0	53	53.0	40	40.0	5	5.0	3.4800

dalam pengelolaan dana desa											
Perangkat desa jujur dalam pengelolaan dana desa	0	0	2	2.0	52	52.0	39	39.0	7	7.0	3.5100
Rata-rata Keseluruhan											3,425

Sumber: Data Primer diolah (2022)

b. Hasil Jawaban Responden Variabel Y

Tabel 4.3

Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Item Pertanyaan	Skor										Mean
	STS		TS		N		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Penyusunan anggaran dana desa dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip penganggaran	0	0	2	2.0	52	52.0	39	39.0	7	7.0	3.5100
Pemerintah desa bekerja sesuai dengan program yang telah disusun	0	0	2	2.0	57	57.0	36	36.0	5	5.0	3.4400
Pelaporan keuangan dilakukan secara tepat waktu	0	0	5	5.0	60	60.0	30	30.0	5	5.0	3.3500
Masyarakat dapat mengakses laporan petanggungjawaban penggunaan dana desa	0	0	2	2.0	57	57.0	36	36.0	5	5.0	3.4400
Rata-rata Keseluruhan											3,435

Sumber: Data Primer diolah (2022)

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Validitas		
		r-Hitung	Sig	Ket
Kompetensi Perangkat Desa (X)	X.1	0,875	0,000	Valid
	X.2	0,663	0,000	Valid
	X.3	0,894	0,000	Valid
	X.4	0,908	0,000	Valid
	X.5	0,885	0,000	Valid
	X.6	0,873	0,000	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pegawai (Y)	Y.1	0,950	0,000	Valid
	Y.2	0,984	0,000	Valid

	Y.3	0,914	0,000	Valid
	Y.4	0,984	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang ada pada instrumen penelitian dapat dinyatakan valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} 0.1966, selain itu nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliability
Kompetensi Perangkat Desa (X)	0,922	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pegawai (Y)	0,969	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah (2022).

Dari hasil uji reliabilitas terhadap kuisioner yang disebarkan, diperoleh hasil bahwa seluruh faktor atau butir adalah reliabel karena memiliki Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.6
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.58605862
	Absolute	.077
Most Extreme Differences	Positive	.041
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.774
Asymp. Sig. (2-tailed)		.586

Sumber: Data Primer diolah (2022)

Berdasarkan nilai signifikan yang ditunjukkan pada hasil output SPSS sebesar 0,586 dapat dinyatakan bahwa data adalah berdistribusi normal, karena memiliki nilai lebih besar dari taraf signifikan 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.7
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kompetensi Perangkat Desa	1.000	1.000

Sumber: Data Primer diolah (2022).

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. Karena semua pertimbangan dan syarat-syarat penelitian uji multikolinearitas sudah terpenuhi, dengan nilai VIF tidak lebih besar dari 10.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.8
Uji Persamaan Regresi dan Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.745	.635		2.748	.007
X	.584	.030	.889	19.200	.000

Sumber: Data Primer diolah (2022)

a. Persamaan Regresi

Secara matematis model fungsi regresi linear berganda dapat dinyatakan sebagai berikut : Interpretasi persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.745 + 0,584 \cdot X$$

Peningkatan terhadap variabel Kompetensi Perangkat Desa (X) 0,584 adalah positif, yang berarti bahwa adanya hubungan searah antara variabel bebas dan variabel terikat, semakin meningkat nilai pada variabel Kompetensi Perangkat Desa, maka hubungan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pegawai juga akan meningkat sebesar 58,4%

b. Hasil Uji-t

Uji t Digunakan untuk menghitung signifikansi pengaruh secara parsial atau dari masing-masing variabel X terhadap Y. Hasil nilai signifikansi pengujian (Sig.t) sebagai berikut : Variabel X Kompetensi Perangkat Desa didapatkan nilai sig. = 0.000 (Nilai Sig. < 0,05) lebih kecil dari 0,05, yang artinya secara parsial variabel Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

c. Hasil Uji-F

Tabel 4.9
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	471.817	1	471.817	368.658	.000 ^b
Residual	125.423	98	1.280		
Total	597.240	99			

Sumber: Data Primer diolah (2022)

Dari Uji Anova atau F test, didapat tingkat signifikansi nilai sig. = 0.000 (Nilai Sig. < 0,05) Karena probabilitas 0,000 maka model regresi bisa dipakai untuk mengetahui pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pegawai. Atau secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

d. Hasil Uji Determinasi

Tabel 4.10
Tabulasi interpretasi nilai R

No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
1	0,800 – 1,000	Sangat Kuat
2	0,600 – 0,799	Kuat
3	0,400 – 0,599	Sedang
4	0,200 – 0,399	Rendah
5	0,000 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber : Sugiyono (2005)

Tabel 4.11
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.889 ^a	.790	.788	1.13129

Sumber : Data Diolah Penulis 2022

Tabel model summary terlihat nilai Nilai R dengan nilai sebesar 0,889 atau 88,9% adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel X terhadap variable Y. Nilai korelasi tersebut menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat karena berada di antara 0,800 sampai dengan 1,000. Artinya model penelitian mampu menjelaskan dari perubahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pegawai sebesar 88,9%. Sedangkan sisanya (100%-88,9% = 11,1%) dijelaskan oleh faktor lain.

Pembahasan

Variabel Kompetensi Perangkat Desa didapatkan nilai sig. 0.000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Artinya semakin baik Kompetensi Perangkat Desa yang diberikan maka semakin tinggi pula Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kemudian Nilai R dengan nilai sebesar 0,889 atau 88,9% adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat antara variabel X terhadap variable Y. Artinya model penelitian mampu menjelaskan dari perubahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pegawai sebesar 88,9%. Sedangkan sisanya (100%-88,9% = 11,1%) dijelaskan oleh faktor lain

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan masyarakat memiliki tugas untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa dapat menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sesuai dengan tugas yang seharusnya dilakukan oleh aparat. Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh Ferina, Burhanuddin, & Lubis (2016) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia. Dengan kata lain, kompetensi perangkat desa sangat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan ketika perangkat desa memiliki kompetensi yang baik, maka dalam pertanggungjawaban dana desa dalam bentuk pembuatan laporan keuangan juga akan baik. Perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik, maka pengetahuan, kemampuan, dan sikap dalam penyusunan laporan keuangan juga akan berkualitas. Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Artinya semakin baik Kompetensi Perangkat Desa yang diberikan maka semakin tinggi pula Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Peningkatan terhadap variabel Kompetensi Perangkat Desa 0,584 adalah positif, yang berarti bahwa adanya hubungan searah antara variabel bebas dan variabel terikat, semakin meningkat nilai pada variabel Kompetensi Perangkat Desa, maka hubungan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pegawai juga akan meningkat sebesar 58,4%. Kemudian Nilai R dengan nilai sebesar 0,889 atau 88,9% adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat. Perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik, maka pengetahuan, kemampuan, dan sikap dalam penyusunan laporan keuangan juga akan berkualitas

Saran

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perangkat desa hendaknya dapat lebih meningkatkan pemahaman akan siklus akuntansi sehingga dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, perangkat desa dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perangkat desa hendaknya dapat meningkatkan produktifitas dalam bekerja, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana dapat secara tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Perangkat desa hendaknya dapat lebih meningkatkan rasa tanggungjawab akan kegiatan yang masih harus dilakukan dalam pemerintahan desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga perangkat desa akan lebih memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola dana desa.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen dan memilih mediator dengan variabel lain yang dapat memediasi secara signifikan pengaruh variabel-variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa